

Arief Yuwono, dkk.

KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN

Kata Pengantar: **PROF. DR. EMIL SALIM**



Cepat atau lambat kita harus menyadari bahwa bumi juga perlu hidup tanpa polusi. Yang harus dipahami umat manusia adalah tidak bisa hidup tanpa bumi, tapi planet ini bisa hidup tanpa manusia.
- Evo Mor

Keberlanjutan Lingkungan

1016003097

© 2016 - PT Kanisius

Penerbit PT Kanisius (Anggota IKAPI)

Jl. Cempaka 9, Deresan, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, INDONESIA

Kotak Pos 1125/Yk, Yogyakarta 55011, INDONESIA

Telepon (0274) 588783, 565996; Fax (0274) 563349

E-mail : office@kanisiusmedia.com

Website : www.kanisiusmedia.com

Cetakan ke-	3	2	1
Tahun	18	17	16

3Editor : Arief Yuwono, Yustinus Ade Stirman, Rosa Delima

Desain isi : Oktavianus

Sampul : Joko Sutrisno

ISBN 978-979-21-5095-7

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apa pun, termasuk fotokopi, tanpa izin tertulis dari Penerbit.

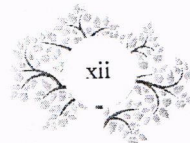
Dicetak oleh PT Kanisius Yogyakarta



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Prakata Penyunting	ix
Daftar Isi	xi
BAB I KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN	1
Mimpi Indonesia 2045	2
Energi Baru dan Terbarukan dalam Perspektif Ketahanan Iklim	8
Pengendalian Dampak Lingkungan: Antara Pendekatan Sistemik Dan Penerapan Program	13
Idaman Kota Ekologis Abad Xxi	24
2050, Indonesia <i>Green State</i> ?	33
Tiga Pilar Demokrasi Lingkungan	40
Menyongsong Transportasi Humanis Dan Berkelanjutan	55
Adipura Menuju Indonesia Lestari	62
Membangun Transportasi Ramah Lingkungan Tidak Sekadar Komitmen	67
<i>Quo Vadis</i> Tanggung Jawab Negara Dalam Penegakan Hukum Lingkungan	71
BAB II JAWA DARURAT KRISIS LINGKUNGAN	93
Telegram Darurat Untuk Jawa	94
Jalan Makan Lahan	97

	Jawa Dalam Lipatan Kezaliman Tata Ruang	102
	Tol Trans Jawa: Sejahtera Atau Sangsarakan Rakyat?	105
	Trans-Jawa Sebagai Anomali?	109
	Dimensi Sosial Dan Lingkungan Jalan Tol Trans-Jawa	115
	Tol Semarang—Solo Dinikmati Siapa?	119
	Tol Semarang—Solo Demi Gengsi?	124
	Jalan Tol Di Jawa Tengah, Untuk Kepentingan Siapa?	128
BAB III	MENCEGAH ARMAGEDON DI JAWA.....	135
	Menuju Sustainability Jawa 2025	136
	Mencegah Jawa 'Tenggelam'	142
	Sistem Urban Di Jawa	146
	Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup	157
	<i>Tales Of Two Cities</i>	162
	Legasi Sebuah Kota	167
BAB IV	MENGUATKAN KELEMBAGAAN LINGKUNGAN..	173
	Menguatkan Kelembagaan Lingkungan	174
	Integrasi KLHK, Mau Apa?	178
	Tantangan Lingkungan Kabinet Tri Sakti	186
	KLH 2014-2019, Antara Diskusi dan Eksekusi	192
	Setahun Perjalanan Klhk	199
	Penggabungan, Mau Apa?	203
	Sinergi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Untuk Kesejahteraan Rakyat	211
BAB V	MENAJAMKAN POLITIK LINGKUNGAN	217
	Lingkungan, Politik, dan Partai Politik	218
	Pemilu, Perubahan Iklim, dan Pemimpin Pro Lingkungan	224
	Dicari: Pemimpin Pemberkelanjutan Berwawasan Lingkungan	229
	Dicari: Pendekar Lingkunga.....	233
	Pemilu 2014: Mencari Sang Promotor	238



Mencari Pemimpin Yang Berwatak Pro Lingkungan	249
Dicari Menteri Lingkungan Hidup yang Berkarakter	260
BAB VI KEANEKARAGAMAN HAYATI MASA	
DEPAN BANGSA.....	265
Obat—Makanan Dari Tanah Air	266
Urban Biodiversity Dan Keberadaban	270
Dari Keanekaragaman Hayati Menuju Keseragaman Hayati?	275
Yahukimo.....	280
Kota Papua Dan Kelestarian Hayatinya	284
Bumi Papua, Aku Datang	290
Otonomi Papua Bukan Untuk Nestapa	295
Papua Paradoks	301
Te Aro Neweak Lamo.....	306
Fungsi Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pada Era Otonomi Daerah.....	312
SENTUHAN AKHIR.....	329
Dosa Lingkungan Siapa?	330
GLOSARIUM	336
BIOGRAFI PENULIS.....	367



2050, INDONESIA GREEN STATE?

(Artikel khusus buku Keberlanjutan Lingkungan)

Oleh: Suparto Wijoyo

NEGARA adalah kota besar. Atau, negara adalah desa yang ter-majukan oleh peradabannya. Sebagai kota atau desa bagi negara adalah soal penempatan maupun penilaian. Negara kota terkesan soal kemajuan dan negara desa menyisakan kelambatan budaya yang berbilang modern. Negara raya yang suka “membusungkan dada” dalam bingkai kota-kota metropolitan-megapolitan sesungguhnya telah menjadi korban aksiomatik pembangunannya sendiri. Kemajuan yang dinisbatkan dalam terminologi “pembangunan” acapkali menggerus peradaban kenegaraannya pada tingkat yang mencemaskan. Terhadap hal ini, saya teringat perkataan cerdas dan tegas **Khalid Fazlun** dari *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science*, England, UK yang mengungkapkan bahwa *progress* (kemajuan) telah menghasilkan *pollution* (pencemaran) dan pembangunan (*development*) identik dengan kerusakan (*destruction*). Tegas *cekak aosnya* (singkat-padatnya): P (*Progress*) + P (*Development*) = P (*Pollution*) + D (*Destruction*). Inilah yang sebenar-benarnya “tragedi kolektif” yang sedang melanda kehidupan negara. Pelangi ekologia maupun sosio-kultural perkotaan terkoyak atas nama “kemajuan” sebagai bagian derap langkah pembangunan.

Siapa pun yang peduli dengan keberlanjutan sebuah negara harus berancang-ancang mewujudkan bangunan entitas negara taman surga ("*garden state*"). Di kala **Alex Wilson** cs meniuip "seruling" integrasi antara ekologi dan *real estate* melalui "pendulum" *green development*, saya terinspirasi secara imajinatif untuk merengkuh *green state* (negara hijau, bukan *kolor ijo*). Semua pihak hampir mau mimpi indah yang sama tentang *garden state-green state* dan dipastikan sedemikian khawatir atas terjadinya evolusi kenegaraan yang semakin lama semakin kehilangan "jiwanya".

Simaklah dengan cermat dan mawas diri apa yang sedang berputar dalam rumpun sejarah kenegaraan. Indonesia yang kini mampu menggelar kota-kota modern yang disebut *metropolitan* seolah-olah bergeser dengan kencangnya menuju poros *megapolitan* untuk berubah wajah menjadi "entitas negara" yang lazim dinamakan *ecumenopolitan*. Fase ritmis-historis negara yang bergerak dalam konsepsi perkotaan ini pada akhirnya tertambat juga di ujung cerita sebagai *nekropolitan*, alias negara kota kematian. Memang, warga negara dalam kota dalam derajat tertentu sepertinya sedang antre untuk membeli tiket kematiannya dan ramai-ramai diperlakukan seperti barang "sisa rampasan perang" yang hendak disantap untuk selanjutnya "diwaris dan dimakamkan secara massal". Kota berubah "peran kesejatiannya" yang tak ubahnya seperti "pekuburan umum" bagi warganya. Mengerikan bukan? Inilah yang tengah melanda negara-negara di dunia sepanjang rotasi periodisasi "penggelembungan harga" eksistensi dan fungsinya sebagai habitat "akhir zaman". Akankah pada tahun 2050 hal ini akan berbalik arah terjun bebas dan lahirlah *green state*? Semua bermula dari keputusan ekologis kepemimpinan nasional saat ini.

Secara sederhana saya maupun publik sendiri suka-sukalah sedikit *usilis nan cerewetis* untuk memelesetkan beberapa kota Indonesia yang semakin mekar: Jakarta – jangan coba-coba kita tanpa harta dan tahta. Bandung semakin penuh beban dan dirundung mendung. Semarang kota yang semakin meradang kena rob yang berkepanjangan. Surabaya misalnya manjadi "*surabahaya*", Sidoarjo menuju "*sidoajor*" (jadi hancur), Malang yang kian "*malang nian nasibnya*" dan Gresik tidak lagi "*seger*

lan resik" (segar dan bersih) melainkan "*nggrees*" (demam) dan "*berisik*" (ramai yang seramai-ramainya). Tambah lagi Semarang pun menyembul menjadi "*sama-sama meradang*" atau "*sesama orang-orang meriang* (panas-dingin) yang *malang*", dan Bandung terbidik "*tambah bandel dan badung*" (nakal) alias suka-suka "*mbadut*" (melawak) karena aneka ragam pakaian yang tercipta dari jazirah Bandung. Amboi ... bagaimana dengan Ibuk(i) (o)ta Jakarta yang kian *ajeg* dengan harta. Ya ingat lagi soal Jakarta ... Jakarta, *jaya karena harta (tahta atau wanita)*. Siapa yang tidak *berduit* jangan adu di Jakarta dan akhirnya tatanan kehidupan Jakarta selalu *ribet* soal *duit* (harta), tahta dan betapa membanjirnya "urusan wanita". Maka Jakarta telah menjadi kota yang penuh kejutan dan apa pun yang tidak mungkin ternyata bisa terjadi di Jakarta yang kehilangan rohani Jayakartanya dalam makna yang setulusnya.

Sejujurnya dapat dikatakan bahwa semua itu (yang dialami kota-kota metropolis) tidak hanya melanda Indonesia, tetapi juga tergelar di negara-negara lain (maju). Kenyataan tersebut agaknya sudah mewabah dalam skala global. Mengikuti informasi dari *Eko Budihardjo*, bukankah Chicago telah dilecehkan dengan sebutan "*sickago*" dan Frankfurt dijuluki "*krankfurt*" alias kota yang sakit. Indianapolis diberi nama ledakan "*india-no-place*" karena tidak adanya *sense of place*. Ini adalah sebuah parodi kenaifan yang melanda metropolis untuk terjun bebas menjadi nekropolis. Pada tataran demikian terungkitlah bahwa udara yang kita hirup ini tidak lebih dari "*parfum beracun*" karena tingginya tingkat pencemaran udara. Air minum yang setiap hari kita konsumsi tak ubahnya "*sirup kimia*" dan tanah yang kita injak seolah meradang tangis menjadi "areal pesta para penyamun perkotaan". Para perompak sedang mengempung seluruh segmen *kampung-kampung* metropolitan.

Tidakkah semua orang tahu setahu-tahunya bahwa penindasan maupun pelecehan sesama warga negara di kota-kota kini bukan lagi barang langka dalam kehidupan perkotaan. Tiada hari tanpa kejahatan dan kezaliman yang menerpa antarsesama warga negara. Aneh bukan? Kenapa kewargakotaan kita menjadi tersayat-sayat sedemikian rupa? Ini tentu saja bukan cita dasar pembangunan dalam kemajuan Indonesia. Konflik yang tergelar dan kebrutalan kehidupan yang semakin me-

ngerikan adalah perlambang bahwa negara mana pun yang terbilang modern itu sedang menjadi lahan jarahan. Warga negara pada galibnya sedang disandera oleh “keluarga besarnya” demi kemajuan kotanya sendiri. *Astagfirullah*.

Kenapa itu semua terjadi? Tentu ada yang dusta dan salah dalam mendesain kota-kota di Indonesia maupun dunia. Apa hendak dikata? Kota telah ditata secara tidak *toto* dengan mengarusutamakan kepentingan sesaat dan mengabaikan pertimbangan-pertimbangan *azalinya*. Lahan dan ruang kota “dirampok” dan “dilacurkan” secara terang-terangan oleh simpul-simpul kuasa kota dengan alasan desakan “misi suci” pencitraan *global city*. Padahal sebagaimana dipesankan oleh *John Eade*: suatu globalisasi perkotaan pada dasarnya juga bermula secara implikatif dari *local process* penataan ruang kota.

Kini kota telah “dipatenkan” sebagai “kamar raksasa” yang dihiasi dengan tanaman-tanaman kepalsuan. Gedung-gedung tinggi dicipta tanpa memedulikan nuansa alamiah lingkungan dan budaya setempat. Hutan kota telah diganti dengan hutan beton yang tidak mampu menyerap emisi gas buang. Taman kota berubah wajah menjadi taman iklan dan seakan-akan meneguhkan pengalihgunannya sebagai “makam kota”. Pasar-pasar tradisional digerus dan dilempar jauh dari gelanggang kota. Pasar rakyat terkikis dan digeser ke liang lahat oleh “monster” perdagangan dengan atribut *Mall-mall* yang kian *memolak-malikkan* (menjungkirbalikkan) daya hidup warga kota melalui “anak ajaib” yang dinamakan *Trade Centre*. Kota tampil kian ganas membombardir warganya dengan lamunan-lamunan konsumtif dan *mejeng*. Belanja pun mesti menjadi gaya hidup dengan segala kemewahannya. Kini pertoban ekologis harus dilakukan dengan merekonstruksi kembali tatanan kota di Indonesia untuk menyediakan ruang hijau pada setiap lini gedung-gedung kota atau desa.

Inikah diri kita? Warga kota pada awal mulanya adalah “sedarah” yang saling empati dan apresiatif pada karya-karya sesamanya. Tidak bisakah ini kita hidupmakan kembali dengan manata kehidupan kota yang *humanopolis*, yaitu kota yang *kamanungsan* terhadap warganya. Ini adalah kota kita yang menurut lirik lagu ibaratnya “*rumah kita sendiri*”.

Marilah membangun kota berperikemanusiaan bahwa di antara kita adalah “saudara setumpah darah” yang tidak ingin “ada dusta”. Jangan ada lagi kekerasan di kota-kota kita. Kenapa kita tega memakan dan menyantap dengan riangnya “daging sesama warga”. Kenapa kehidupan perkotaan menjadi sedemikian kanibal dan saling memangsa? Kita adalah manusia yang *berhati nurani* sebagai karya agung *Sang Khalik*, sehingga sewajarnya kita membangun kota yang humanis.

Lebih dari itu, selamatkan pula kota-kota Indonesia ini dengan mengembalikan ke *fitriahnya*. Kota dibangun dengan tata kota yang harus berbasis situasi ekologis. Banyak pemikiran dan gagasan yang dapat disitir, misalnya saja *George F. Thompson* dan *Frederick R. Steiner* telah mengajarkan mengenai hal ini dalam bingkai *ecological design and planning*. *S.E. Jorgensen*, *B. Halling-Sorensen* dan *S.N. Nielsen* dengan kesungguhannya mau memberi arahan tentang tema-tema *environmental and ecological modeling*. Bahkan *green legislation and green regulation* di Indonesia sudah sangat banyak yang juga memformulasikan rambu-rambu penataan ruang kota secara yuridis.

Harus disadari sesadar-sadarnya bahwa lingkungan telah menjadi dimensi penting dalam konstruksi negara berkelanjutan dalam kerangka *sustainable development*. Warga negara di mana pun tidak mungkin dapat hidup dengan prima dari udara yang tercemar, air yang kotor, ataupun tata kota yang tidak estetis. Warga kota yang hidup “bersahabat” dengan air, udara, dan tanah yang tercemar sesungguhnya memberi sinyal bahwa mereka tengah “ditakdir” berinkarnasi menjadi “fosil-fosil” perkotaan. Kemajuan kota pada akhirnya harus menjadi “berhala persembahan” bagi warganya atau sebaliknya warga tengah dibopong menjadi “tumbal” kotanya sendiri. Untuk itulah membangun kota yang *ecopolis* dengan mengembangkan kebutuhan ekologisnya merupakan tuntutan “ziarah perkotaan” ke “tanah yang diperjanjikan”. Kota-kota yang “bermunajat” di “altar” aspek lingkungannya inilah dalam spektrum konsepsi kota-kota berkelanjutan dikualifikasi sebagai bagian integral *cities of tomorrow*. Adapun kota yang mengabaikan dimensi kehayatan kemanusiaan dan lingkungannya pasti akan bergerak merapat menjadi serpihan (bahkan bongkahan) dari rotasi *cities of sorrow* yang *wah serem* (menakutkan).

Pembangunan semua negara yang berkemanusiaan dan berwawasan lingkungan mesti dibingkai dengan koridor hukum. Berdasarkan pemeo yang sangat populer di kalangan ahli hukum *ubi societas ibi ius* di mana ada masyarakat di situ ada hukum atau sebaliknya “tiada hukum yang dibangun tanpa masyarakat” (kecuali hukumnya dunia lain), karena hukum bukan sesuatu yang berlaku di ruang hampa. Untuk itulah penataan negara yang diancangkan guna menciptakan negara yang hukumnya berberkat alias negara yang berhukum penuh martabat (*“juridicopolis”*) adalah *“sunatullah”* yang sedasar dengan kepatutan sosialnya (*“social reasonableness”*). Terkuaknya beragam “kejahatan kenegaraan” yang menghiasi wajah kota dewasa ini menandakan sepertinya kota-kota kita tidak berhukum. Atau mungkin ada hukum, tapi hukumnya sekadar macan kertas (*“paper tiger”*) yang lumpuh menghadapi “keliaran penjajah perkotaan” yang kolonialis.

Kita semua warga kota pada hakikatnya harus mampu merancang bangun sebuah kota di mana semua “anak gembala” dapat hidup menjadi peranti dasar dari *“human-eco-juridicopolis”*. Jiwa rohaniah kota yang berperikemanusiaan, berkarakter lingkungan dan memiliki hukum yang baik (*“good legislation”*) tidaklah mungkin serta merta kita serahkan kepada para *penggede* kota yang telah disindir dengan terangnya dalam Deklarasi Johannesburg tentang Pembangunan Berkelanjutan (*“Johannesburg Declaration on Sustainable Development, 2002”*) melalui untaian kata wicara *“as nothing more than sounding brass or tinkling cymbals”*, ya ... “tong kosong (memang) nyaring bunyinya”. Hasil dari Rio+20 jelas menandakan untuk menomorsatukan lingkungan sebagai kebutuhan masa depan setiap entitas, apalagi negara memanggul kewajibannya. Maka marilah *canct tali wondo* (satukan tekad) membangun negara kita dengan berbasis pada nilai-nilai keabadian hidup yang berupa: kemanusiaan, lingkungan, dan hukum secara serentak untuk mengembangkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi tanpa mengabaikan langgam budaya lokal. Inilah kearifan nenek moyang kita (*“local wisdom”*) yang diorientasikan untuk Indonesia masa depan dengan hidup *sak madio* alias seimbang dalam segalanya.

keruwetan batin warganya. Semua sungai dan kanal-kanal kecil serta jejak jalanan Pulau Jawa tampak berserak dengan keindahannya sendiri sesuai dengan batas peradabannya. Tentu ini bukan sesuatu yang salah. Tata ruang Pulau Jawa dikelola dengan manajemen alamiah seakan tanpa sentuhan sekolahan. Ilmu sepertinya sedang digadaikan oleh kekuasaan yang begitu menggurita.

Maka zaman bergerak cepat dengan kilatan pendidikan. Bangku sekolahan telah digelar dan dihelat dalam bingkai yang menggembirakan. Pakar-pakar tata ruang dihasilkan dan ahli hukum tata ruang diciptakan. Apa yang terjadi kemudian? Baikkah tata ruang Pulau Jawa? Semakin nyamankah tinggal di belantara tanah Jawa? Adakah Pulau Jawa semakin aman dan nyaman sebagai tempat tinggal.

Terhadap kata aman dan nyaman semoga pembaca sempat menerawang jauh ke zaman Nabi Ibrahim atau sang Sahabat Tuhan alias Abraham, Bapak Tiga Agama. Sewaktu menata umat dan wilayah kekuasaannya di segmen Tanah yang Diperjanjikan, Sang Sahabat Tuhan selalu berdoa agar negaranya dijadikan negara yang aman dan nyaman.

Maka wilayah kekuasaannya dibagi dalam lini sesuai dengan dominasi kehidupan warganya. Kawasan pertanian untuk para petani. Sawah dan ladang dalam bahasa sekarang jangan dijadikan sebagai kawasan tambang dan industri. Menata ruang wilayah sesuai dengan kondisi nyata yang telah tergelar untuk selanjutnya ditata sesuai dengan kecerdasan yang terperikan. Wilayah ruang dipilah dalam bingkai ekologis, ekonomi, sosial-budaya dan kerakyatan. Tanah yang secara konservasi layak menjadi areal konservasi pasti dikembangkan, bukannya dibinasakan. Kawasan konservasi tidak akan dijadikan sebagai wilayah industri. Hutan dihijaukan dengan dijaga secara ajek tanpa pencerahan.

Untuk itulah menata ruang haruslah berbasis kepentingan lingkungan, ekonomi, dan sosial secara seimbang. Dan apakah yang sedang terpentaskan di Tanah Jawa? Sawah ladang telah dijual. Sumber air diusahakan dengan birokrasi yang mencekam dengan lahirnya izin perusahaan sumber daya air, yang diatur dalam Undang-undang Sumber Daya Air. Penataan ruang tidak dilakukan sesuai dengan basis

yang ada. Undang-undang Penataan Ruang 2007 belum disosialisasikan dengan matang.

Kita semua mesti menyadari bahwa tata ruang adalah pertarungan kita. Siapa yang akan menjadi pemenang, investor atautkah sekadar predator? Kita mau membangun kepemimpinan yang menjadi wali lingkungan atau mau mencetak maling alias mafia lingkungan. Siapa yang lebih serius untuk maju ke dalam pentas politik kepemimpinan ke depan adalah mereka yang menghambakan diri kepada kepentingan lingkungan.

Tata ruang bagian dari tatanan Tuhan. Maka siapa yang menzalimi ruang adalah sama dengan melawan Tuhan. Tuhan telah menciptakan ruang sesuai dengan peruntukannya. Ada gunung gemunung, ada pula dataran yang menghampar, serta samudera yang bergelombang. Ada tanah pesisir dan ada tanah bebatuan. Gunung biarlah berdiri tegak menjadi paku bumi yang menghampar. Janganlah gunung dikepras dan ditambang atau dijarah isinya seperti yang terjadi di Papua atau NAD atau Sulawesi dan Kalimantan. Sungai biarlah mengalirkan air yang tetap jernih dan jangan dikotori seperti ini hari. Bumi biarlah menghijau dengan sawah ladangnya dan jangan dicemari limbah raya yang mengalir tanpa pengolahan.

Ini sekadar contoh kecil bagaimana Tuhan mencipta alam dalam porsi yang pas dan manusia Republik ini membalikkan logika-Nya. Ada gunung yang dipotong dan ada danau yang menggunung dengan tailing tambang. Lautan jangan diembat isi tanpa perhitungan. Dan, Jawa benar-benar sedang dirong-rong wibawa alamiahnya dengan segala kerakusan kekuasannya yang bertengger di atasnya.

Hutan Pulau Jawa yang benar-benar lestari tinggal tersisa 14% saja. Hampir 65% hutan Pulau Jawa rusak parah dengan penggundulan yang menggila. Ini adalah pertanda bahwa Jawa sedang dalam bahaya. Bisakah UU Penataan Ruang menyelamatkan Pulau Jawa? Semua kembali pada kita dan aparaturnya penegak hukumnya. Selamatkan Pulau Jawa sekarang juga. Bukankah kita perlu merdeka dari kezaliman tata ruang yang digeser oleh kemenangan tata uang? Merdeka berarti menyelamatkan tumpah darah bukan? Saatnya kita bertindak nyata. MERDEKA.